

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU INTELEKTUAL (INTELCTUAL DADER) DALAM PERKARA POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (Studi Putusan PN Padang Sidempuan No.157/Pid.Sus/2019/PN.PSP)

Syafrida Rachmawati Rasahan

Pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan pemilu adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang mencederai demokrasi, bahkan pada saat ini politik uang yang sering terjadi dalam masa pemilu, seakan menjadi syarat wajib, bagi setiap calon pejabat baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat, tentunya akan menjadi budaya atau tradisi di dalam pemilu itu sendiri, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi.

Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku intelektual dalam perkara politik uang dalam pemilu legislatif, penegakan hukum terhadap pelaku intelektual dalam perkara politik uang pada pemilu legislatif serta pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan No.157/Pid.Sus/2019/PN.Psp.

Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dari tesis ini ada 2 hal yang perlu menjadi kajian akademis yaitu : *pertama*, bahwa tidak terdapat pengaturan khusus terhadap pelaku dalam tindak pidana politik uang, karena ketentuan dalam Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum tidak membedakan antara orang yang melakukan ataupun orang yang menyuruh melakukan. Malah dalam pengaturan ketentuan Pasal 523 tersebut menyamakan antara pelaksana, peserta dan tim kampanye sebagai subjek yang dapat dikenakan saksi pidana dalam perbuatan politik uang. Pasal tersebut hanya membedakan waktu peristiwa atau perbuatan politik uang yang dilakukan oleh pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye yaitu dilakukan pada masa kampanye, pada masa tenang dan pada masa hari pemungutan suara. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada perkara politik uang dengan nomor putusan 157/Pid.Sus/2019/PN.Psp yang dilakukan oleh Peserta Pemilu sebagai orang yang berinisiatif untuk menyuruh tim kampanyenya melakukan politik uang (berkas perkara terpisah) tidak lah berbeda dengan tim pelaksana kampanye Caleg tersebut dan berbeda juga dengan tuntutan Penuntut Umum.

Kedua, perlu untuk melakukan perbaikan pengaturan tentang subjek pelaku politik uang, pengaturan tentang ancaman sanksi terhadap pelaku politik uang sesuai dengan peran dari masing-masing subjek serta perlu ada batasan minimal ancaman hukuman yang sesuai dengan asas keadilan hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pelaku Intelektual, Politik Uang, Pemilu Legislatif.

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST INTELLECTUAL OFFENDERS (INTELCTUAL DADER) IN MONEY POLITICS CASES IN THE 2019 LEGISLATIVE ELECTIONS IN THE DISTRICT NORTH PADANG LAWAS

(Study of Padang Sidempuan District Court Decision No. 157/Pid.Sus/2019/PN.PSP)

Syafrida Rachmawati Rasahan

Violations that often occur during elections are the widespread practice of money politics. Money politics is considered a practice that injures democracy, even nowadays money politics, which often occurs during election periods, seems to be a mandatory requirement for every candidate for office, whether at the central or regional level, to get the support and majority of votes from the public. of course it will become a culture or tradition in the election itself, thus tarnishing the meaning and significance of democracy..

The problem in this thesis research is how to regulate the law against intellectual actors in money politics cases in legislative elections, law enforcement against intellectual actors in money politics cases in legislative elections and the legal considerations of the panel of judges regarding decision No.157/Pid.Sus/2019/PN .Psp.

The research uses descriptive analytical research, the type of research used in this research is normative juridical using library research and data analysis using qualitative methods which produce descriptive-analytical data.

Based on the research results from this thesis, there are 2 (two) things that need to be studied academically, namely: first, that there are no special regulations for perpetrators in money politics crimes, because the provisions in Article 523 of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections does not differentiate between the person who carries it out or the person who orders it to be carried out. In fact, the provisions of Article 523 equate the implementers, participants and campaign teams as subjects who can be subject to criminal witnessing in money politics acts. This article only differentiates the timing of money political events or actions carried out by implementers, participants and/or campaign teams, namely during the campaign period, during the quiet period and on voting day. That the criminal sanctions imposed by the Panel of Judges in the money politics case with decision number 157/Pid.Sus/2019/PN.Psp which were carried out by Election Contestants as people who took the initiative to order their campaign teams to carry out money politics (separate case files) are no

different with the legislative candidate's campaign implementation team and is also different from the demands of the Public Prosecutor.

Second, it is necessary to improve the regulations regarding the subject of money politics perpetrators, regulations regarding the threat of sanctions against money politics perpetrators in accordance with the role of each subject and there needs to be a minimum limit for the threat of punishment in accordance with the principles of legal justice.

Keywords : Law Enforcement, Crime, Intellectual Actors, Money Politics, Legislative Elections.